

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai Upaya Penurunan Kemiskinan Ekstrem berbasis Data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)

Rosida P. Adam & Fatlina Zainuddin

Universitas Tadulako, Palu

Email: fatlina.z@gmail.com

Abstract

This study aims to develop a Strategy for Achieving Minimum Service Standards (SPM) as an Effort to Reduce Extreme Poverty Based on P3KE Data (Acceleration of Targeting for the Elimination of Extreme Poverty) in Tojo Una-Una Regency. The government's budget policy in 2023 is directed only to 3 areas, namely SPM in the health sector (20%), education (25%), and PUPR (minimum 40%). The research sample was from Ampana Tete District, which has high extreme poverty. The analysis method is the SWOT analysis approach and continued with the QSPM (Quantitative Strategy Planning Matrix) analysis. The results of the study showed that in Extreme Poor Households in Tojo Una-Una Regency, the highest decile III was 28.2%, followed by decile IV at as much as 26.4%, decile I at as much as 23.1% and decile II at 22.3%. Notably, the distribution of Education is predominantly among elementary school graduates, amounting to as much as 45%, highlighting the potential for education-based poverty alleviation strategies. The head of the family's occupation is predominantly farmers and fishermen. The average SPM performance achievement in the education sector is 63.60%. The accomplishment of SPM Health performance is 62.03%, while the achievement of SPM PUPR is 69.97%. The SPM Target Achievement Strategy, for the health and education sectors is in quadrant I (S-O) and II (S-T). At the same time, the PUPR sector is in quadrants II (S-T) and IV (W-T).

Keywords poverty, P3KE, SPM, SWOT, Tojo Una-Una.

1. Pendahuluan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Instruksi ini lahir dengan semangat dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 menjadi nol (0) %. Kemiskinan ekstrem menurut BPS adalah penduduk yang berpendapatan di bawah US\$1,91 PPP (*purchasing power parity*) per kapita per hari (setara Rp. 9.089,- per hari). Secara Nasional kemiskinan ekstrem di Indonesia sebanyak 110.147.889 jiwa, dan Penduduk miskin ekstrem di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 1.435.504 jiwa serta penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah sebanyak 104.868 jiwa atau berkontribusi terhadap kemiskinan ekstrem di Sulawesi Tengah sebesar 7,31 %. Oleh karena tingginya kemiskinan ekstrem di Indonesia, maka sejak tahun 2023, kebijakan anggaran diarahkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya Bidang Pendidikan dasar, Kesehatan, dan Pekerjaan

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Umum dan Perumahan. Berdasarkan Data P3KE, menunjukkan bahwa di Kabupaten Tojo Una-Una terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau putus sekolah pada usia 7-12 dan 13-15 tahun, sebanyak 26,79 % atau 6.954 orang.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tahun 2023 SPM PAUD terdapat 9 (sembilan) indikator dan total rata-rata capaiannya sebesar 78,79 %, SPM SD 14 indikator, total rata-rata capaiannya 65,29 %, SMP 14 indikator, total rata-rata capaian sebesar 55,42 %, dan Pendidikan Kesetaraan Paket A dan B 14 indikator, dan total rata-rata capaiannya 57,16 % (Dikpora, 2023). Untuk bidang kesehatan terdapat 12 indikator, total rata-rata capaian SPM sebesar 62,03 %. Selanjutnya, bidang PUPR indikator infrastruktur dasar, yakni program air bersih Tahun 2023 total capaian RTM (Rumah Tangga Miskin) yang menggunakan PDAM sebagai air bersih sebanyak 13.796 RTM atau 48,48 %. Selain itu, RTM yang memiliki Rumah milik sendiri 84,5 % atau 24.079 RTM, tetapi terdapat 35,6 % tidak layak huni (lantai tanah, atap rumbia, dan tembok dari papan). <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/sebaran>

Tujuan peneltin ini yakni menyusun strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui strategi kebijakan yang meliputi: (a) pengurangan beban pengeluaran masyarakat, (b) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (c) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Dalam Pasal 1 ayat (7) dinyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Kebutuhan dasar tersebut pada dasarnya berada pada masyarakat miskin ekstrem desil 1 dan 2. Menurut Yuniarti et al. (2020) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar masih tergolong rendah. Lebih lanjut, Yuniarti et al. (2020) menjelaskan bahwa terdapat indikator SPM Pendidikan dasar yang belum memenuhi kepuasan masyarakat.

2. Tinjauan Literatur

Standar pelayanan minimal ini dimaksudkan untuk melengkapi berbagai jenis standar yang ada di sektor publik yang diharapkan akan menjadi tolak ukur bagi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Standar Pelayanan Minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat (konsumen). Pertama, bagi pemerintah daerah SPM dapat dijadikan tolak ukur (*benchmark*) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan. Kedua, bagi masyarakat SPM dapat dijadikan sebagai acuan kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah Rahayu et al. (2023). Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan (Syafingi, 2017).

Kemiskinan bukan sekadar kekurangan pendapatan dan akses terhadap sumber daya produksi tetapi juga menyangkut bagaimana bias menjamin kelangsungan hidup. Kemiskinan

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

mencakup kelaparan dan malnutrisi, akses yang terbatas untuk pendidikan dan pelayanan dasar lainnya, diskriminasi dan pengecualian sosial, serta kekurangan partisipasi dalam menentukan pilihan (United Nations, 2022). Dalam kasus yang ekstrem, rumah tangga tersebut tidak memiliki pilihan tempat tinggal yang layak bebas resiko banjir, penyakit dan kejahatan sebagai risiko sosial. Hal ini disebabkan kurangnya alternatif perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan. Studi ini merekomendasikan bahwa langkah-langkah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk permukiman informal harus diarahkan pada peningkatan kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dan pulih dari dampak bencana iklim (banjir, sanitasi) dan mengurangi kerentanan social (Umar et al., 2023; Thi Phuong et al., 2023; Arvin et al., 2023). Mencermati, temuan penelitian sebelumnya dan fenomena yang terjadi pada masyarakat yang tergolong rentan sosial ekonomi terutama di pedesaan yang masuk dalam claster miskin ekstrem, sehingga penting dilakukan strategi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

3. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka metode penelitian ini adalah bentuk penelitian deskriptif dan kuantitatif. Sekaran (2017) dan Kumar (2011) menyatakan studi deskriptif (*descriptive study*) mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara sistematis tentang situasi, masalah, fenomena, layanan/program, atau memberikan informasi tentang, kondisi kehidupan masyarakat, atau menggambarkan sikap terhadap suatu masalah. Sedangkan Penelitian kuantitatif adalah sebuah metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka, mulai dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya. Sampel penelitian di kecamatan Ampana Tete yang termasuk pada tingkat kemiskinan yang paling tinggi dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Jumlah kemiskinan Kecamatan Ampana Tete sebanyak 19.116 jiwa atau 5.024 Rumah Tangga Miskin. (Tabel 1). Selanjutnya, analisis data menggunakan pendekatan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses Opportunities, Threats*) dan dilanjutkan dengan analisis QSPM (*Quantitative Strategic Planning Matrix*).

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Tabel 1. Sebaran Kemiskinan Di Kabupaten Tojo Una-Una, Tahun 2023

No.	Kecamatan	Keluarga				Individu					
		Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4
Total (12)		27.964	5.298	7.608	8.731	6.327	108.943	26.664	31.568	30.959	19.752
1.	Una Una	1.705	402	475	491	337	6.336	1.980	1.867	1.576	913
2.	Togean	2.218	851	688	436	243	8.574	4.192	2.549	1.246	587
3.	Walea Kepulauan	933	297	250	227	159	3.880	1.467	1.041	835	537
4.	Ampana Tete	5.024	665	1.477	1.751	1.131	19.116	3.326	6.206	6.221	3.363
5.	Ampana Kota	3.148	473	850	1.023	802	12.515	2.380	3.617	3.798	2.720
6.	Ulubongka	3.843	534	1.133	1.368	808	14.494	2.849	4.690	4.616	2.339
7.	Tojo Barat	1.599	114	382	591	512	6.531	622	1.783	2.363	1.763
8.	Tojo	2.420	302	613	808	697	9.274	1.542	2.645	2.948	2.139
9.	Walea Besar	815	318	225	169	103	3.248	1.618	851	496	283
10.	Ratolindo	3.726	313	798	1.357	1.258	15.121	1.642	3.664	5.445	4.370
11.	Batudaka	1.177	409	349	266	153	4.521	2.002	1.301	792	426
12.	Talatakko	1.356	620	368	244	124	5.333	3.044	1.354	623	312

Sumber: P3KE Tahun 2024. <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/sebaran>.

4. Hasil dan Pembahasan

Profil Kemiskinan. Berdasarkan data P3KE Tahun 2023, jumlah kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 364.391 Keluarga, sedangkan jumlah kemiskinan individu sebanyak 1.435.404 jiwa. Kemiskinan jika dilihat dari jumlah keluarga, berdasarkan desil yang terbanyak adalah desil III yakni 28,2 %, disusul masing desil IV sebanyak 26,4 %, desil I sebanyak 23,1 % dan desil II 22,3 %. Sedangkan dilihat dari individu (jiwa), maka tertinggi berada pada desil I sebanyak 28,2 %, disusul oleh desil III 26,3 %, desil II 23,04 %, dan Desil IV sebanyak 22,5 %. Salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang mempunyai kemiskinan ekstrem tertinggi yakni Kabupaten Tojo Una-Una, sebanyak 104.868 jiwa. Tertinggi berada pada Desil II sebanyak 29,0 %, disusul oleh Desil III 28,4 %, Desil I sebanyak 25,5 %, dan Desil IV sebanyak 18,1%.

Profil Pendidikan. Dilihat dari profil pendidikan menunjukkan bahwa yang tidak bersekolah di usia sekolah 22,1 % (6.208 anak), sedangkan yang bersekolah sebanyak 77,9 % (21.073 anak). Selain itu, untuk sebaran umur yang dominan yang tidak bersekolah pada usia sekolah berada pada range usia 7-12 tahun.

Implementasi Capaian SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan dan PUPR. Standar Pelayanan minimal tiga bidang utama yang diprioritaskan dalam pengurangan beban masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Tojo Una-Una dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. Capaian SPM pendidikan pada Triwulan III Tahun 2023

No	Indikator kinerja/Jenis layanan SPM	Total rata-rata capaian (%)
1	SPM Pendidikan	63,60

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

2	SPM Kesehatan	62,30
3	SPM PUPR	75,87
	Total Rata-Rata SPM 3 Bidang Utama	67,26

(Sumber: Bapperida Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023)

Berdasarkan Tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa Capaian SPM bidang pendidikan rata-rata capaian baru 63,60 %, capaian tertinggi pada indikator SPM SMP, dan yang terendah SPM kesetaraan Paket A dan B.

Strategi Capaian SPM Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Penerapan strategi ini secara holistik dan berkelanjutan dapat membantu mengurangi kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Capaian Standar Pelayanan Minimal (CSPM) adalah suatu strategi untuk memastikan bahwa pelayanan dasar yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terpenuhi. Dalam konteks penghapusan kemiskinan ekstrem, CSPM dapat menjadi instrumen yang sangat penting. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai CSPM dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan rekapitulasi nilai Internal Factor Analysis Summary (IFAS) menunjukkan bahwa total nilai IFAS sebesar 4,50 yang disumbangkan oleh faktor kekuatan sebesar 2,43 dan faktor kelemahan yang lebih rendah yaitu sebesar 2,07. Hal ini mengindikasikan bahwa dari 5 (lima) indikator kekuatan internal, ada 3 indikator penyumbang terbesar yakni pertama: indikator Semua kecamatan terdapat puskesmas, kedua: indikator Sarana dan prasarana tersedia, dan ketiga: indikator Ketersediaan Tenaga Medis/Non Medis. Selain itu, faktor kelemahan yakni indikator Rasio dokter belum terpenuhi, dan ketersediaan sarana dan prasana. Selanjutnya, rekapitulasi nilai Eksternal Factor Analysis Summary (EFAS) menunjukkan bahwa total nilai EFAS sebesar 4,22, yang disumbangkan oleh faktor peluang sebesar 2,22 dan faktor ancaman yaitu sebesar 2,00. Hal ini mengindikasikan bahwa dari 5 (lima) indikator peluang eksternal, ada 2 indikator penyumbang terbesar yakni pertama, indikator Kebijakan anggaran pemerintah, dan kedua: indikator jaminan sosial khusus kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat. Sedangkan faktor ancaman terlihat pada indikator kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan program yang belum tetap sasaran. Selanjutnya, dari rekap matriks IFAS dan EFAS SPM Kesehatan tersebut di atas, dapat dibuat strategi sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian SPM pendidikan pada Triwulan III Tahun 2023

IFAS EFAS	Strengths (S)					Weaknesses (W)				
	Strategi (SO)					Strategi (WO)				
Opportunities (O)	2,43	+	2,22	=	4,65	2,07	+	2,22	=	4,29
Threats (T)	2,43	+	2,00	=	4,43	2,07	+	2,00	=	4,07

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Mencermati Tabel 3 di atas, strategi pada masing-masing kuadran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kuadran 1 (Strategi Agresif/ofensif) Pilihan Strategi Utama (S-O) : Merupakan situasi yang menguntungkan karena memiliki kekuatan yang tinggi untuk meraih peluang. Strategi yang dapat diterapkan sebagai berikut: (1) Mengoptimalkan anggaran kesehatan, untuk memenuhi rasio dokter, Tenaga Medis/Non Medis di semua kecamatan yang terdapat puskesmas. (2) Meningkatkan efektifkan pemanfaatan Jaminan Sosial.

Kuadran 2 (Strategi Mendukung strategi Diversifikasi), Pilihan Strategi kedua (S-T) strategi yang dilakukan: (1) Mengalokasikan anggaran kesehatan secara rasional dan proporsional untuk memenuhi rasio dokter, Tenaga Medis/Non Medis sehingga dapat mengoptimalkan kegiatan sosialisasi tentang kesadaran masyarakat yang relative minim terhadap Kesehatan. (2) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memperlancar aksesibilitas terutama antisipasinya pada cuaca dan iklim pada daerah ekstrem. (3) Meningkatkan validitas data agar masyarakat terlayani dan Program menjadi tepat sasaran

Kuadran 3 (Mendukung Strategi Turn Around) (W-O) strategi yang dilakukan: (1) Meningkatkan Sarana dan prasarana belum memadai dengan alokasi anggaran yang cukup. (2) Memenuhi Rasio dokter yang belum terpenuhi dengan alokasi anggaran yang cukup sehingga dapat merekrut dokter kontrak dengan nilai kontrak yang menarik bagi dokter.

Strategi Peningkatan SPM Pendidikan. Berdasarkan rekapitulasi total nilai IFAS sebesar 4,03 yang disumbangkan oleh faktor kekuatan sebesar 2,10 dan faktor kelemahan yang lebih rendah yaitu sebesar 1,92. Hal ini mengindikasikan bahwa dari 5 (lima) indikator kekuatan internal, ada 3 indikator penyumbang terbesar yakni pertama: indikator Semua kecamatan dan desa terdapat sekolah, kedua : indikator Sarana dan prasarana tersedia, dan ketiga: indikator Ketersediaan Tenaga guru. Selain itu, faktor kelemahan yakni indikator Sering terlambat supply Dana Bos , dan Database kurang akurat/tersedia. Total nilai EFAS sebesar 3,74, yang disumbangkan oleh faktor peluang sebesar 1,95 dan faktor ancaman yaitu sebesar 1,79. Hal ini mengindikasikan bahwa dari 5 (lima) indikator peluang eksternal , ada 2 indikator penyumbang terbesar yakni pertama, indikator Kebijakan anggaran pemerintah, dan kedua: indikator jaminan sosial khusus pendidikan atau Kartu Indonesia Pintar bagi masyarakat miskin. Sedangkan faktor ancaman terlihat pada indikator. Tingginya usia sekolah yang putus sekolah. Selanjutnya, dari rekap matriks IFAS dan EFAS SPM Pendidikan tersebut di atas, dapat dibuat strategi sebagai berikut:

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Tabel 4. Capaian SPM pendidikan pada Triwulan III Tahun 2023

IFAS	Strengths (S)					Weaknesses (W)				
EFAS	Strategi (SO)					Strategi (WO)				
Opportunities (O)	2,10	+	1,95	=	4,05	1,92	+	1,95	=	3,88
Threats (T)	Strategi (ST)					Strategi (WT)				
	2,10	+	1,79	=	3,89	1,92	+	1,79	=	3,71

Mencermati Tabel 4 posisi strategi berdasarkan nilai setiap kuadran, maka kuadran ke-1 yang memiliki nilai tertinggi, dan disusul oleh kuadran ke-2 dan ke 3. Selanjutnya, strategi pada masing-masing kuadran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kuadran 1 (Strategi Agresif/ofensif) Pilihan Strategi Utama (S-O) : Merupakan situasi yang menguntungkan karena memiliki kekuatan yang tinggi untuk meraih peluang. Strategi yang dapat diterapkan sebagai berikut: (1) Optimalkan dan efektifkan anggaran pendidikan di semua kecamatan dan desa, baik melalui anggran kecamatan maupun anggaran desa dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah. (2) Tingkatkan Sarana dan prasarana agar ketersediaan guru secara proporsioanal terpenuhi terutama daerah terpencil. (3) Optimalkan Tenaga Pendamping untuk masyarakat yang masuk dalam PKH dengan jaminan KIP.

Kuadran 2 (Strategi Mendukung strategi Diversifikasi), Pilihan Strategi kedua (S-T) strategi yang dilakukan: (1) Mengoptimalkan fungsi sekolah yang ada di semua kecamatan dan desa serta penyediaan guru yang memiliki kompetensi terutama pada daerah terpencil untuk mengurangi usia sekolah yang tidak bersekolah. (2) Tingkatkan perbaikan Sarana dan prasarana tersedia terutama pada daerah kepulauan agar akses dan jarak lebih lancar sehingga dapat mengurangi usia sekolah yang tidak bersekolah terutama pada masyarakat dengan ekonomi lemah (miskin).

Kuadran 3 (Mendukung Strategi Turn Around) (W-O) strategi yang dilakukan: (1) Meningkatkan manajemen pengelolaan dana Bos sekolah agar tidak terlambat di semua sekolah yang berada di kecamatan maupun di desa. (2) Memenuhi target rasio guru yang belum terpenuhi terutama di wilayah terpencil melalui sarana dan prasarana sehingga guru tertarik untuk mengabdikan di daerah terpencil. (3) Memperbaiki Database kurang yang akurat/tersedia baik jumlah guru maupun murid yang bersekolah dan yang putus sekolah.

Strategi Peningkatan SPM PUPR. Berdasarkan rekapitulasi total nilai IFAS sebesar 4,33 yang disumbangkan oleh faktor kekuatan sebesar 2,33 dan faktor kelemahan yang lebih rendah yaitu sebesar 2,00. Hal ini mengindikasikan bahwa dari 5 (lima) indikator kekuatan internal, ada 3 indikator penyumbang terbesar yakni pertama: indikator. Ketersediaan tenaga teknik, kedua: indikator Manajemen dan tata kelola Anggaran dan ketiga: indikator Komitmen yang tinggi. Selain itu, faktor kelemahan yakni indikator. Data yang akurat, Satuan control, dan Disiplin Pengawas. Selanjutnya, rekapitulasi total nilai EFAS sebesar 4,40, yang disumbangkan oleh

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

faktor peluang sebesar 1,91 dan faktor ancaman yaitu sebesar 2,49. Hal ini mengindikasikan bahwa dari 5 (lima) indikator peluang eksternal, ada 3 indikator penyumbang terbesar yakni pertama, indikator Kebijakan anggaran pemerintah, dan kedua: indikator Kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan proyek, dan ketiga indikator Tenaga Pendamping perumahan. Sedangkan faktor ancaman terlihat pada indikator Kesadaran masyarakat terhadap sanitasi, Kesadaran masyarakat terhadap sanitasi, dan ekonomi keluarga. Selanjutnya, dari rekap matriks IFAS dan EFAS SPM PUPR tersebut di atas, dapat dibuat strategi sebagai berikut:

Tabel 5. Strategi Pencapaian Target SPM Bidang PUPR

IFAS EFAS	Strengths (S)					Weaknesses (W)				
	Strategi (SO)					Strategi (WO)				
Opportunities (O)	2,33	+	1,91	=	4,24	2,00	+	1,91	=	3,91
Threats (T)	2,33	+	2,49	=	4,82	2,00	+	2,49	=	4,49

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa strategi SPM PUPR pada Strategi S-T dengan nilai 4,82, artinya menggunakan kekuatan internal OPD pendidikan untuk meminimalisasi resiko ancaman eksternal. Dan Strategi W-T dengan nilai 4,49. Artinya, dapat melakukan strategi kombinasi meminimalisasi kelemahan internal untuk memanfaatkan seluruh indikator kekuatan internal untuk meminimalisasi ancaman dari luar.

Mencermati diagram peta posisi strategi berdasarkan nilai setiap kuadran, maka kuadran ke-2 yang memiliki nilai tertinggi, dan disusul oleh kuadran ke-4 dan ke-1. Selanjutnya, strategi pada masing-masing kuadran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kuadran 2 (Mendukung strategi Diversifikasi) Pilihan Strategi Utama (S-T): Merupakan situasi yang menguntungkan karena memiliki kekuatan yang tinggi untuk meminimalisir ancaman. Strategi yang dapat diterapkan sebagai berikut: (1) Meningkatkan Manajemen dan tata kelola Anggaran untuk mencapai kinerja SPM, terutama memastikan tepat sasaran program sanitasi, rumah layak huni, dan ketersediaan air bersih. (2) Mengoptimalkan kerja tenaga teknik yang tersedia, untuk efektif dan efisiensi pengawasan proyek. (3) Tingkatkan kesadaran dan pendidikan dan ekonomi keluarga RTM terhadap lingkungan dan pemanfaatan sanitasi.

Kuadran 4 (Strategi Mendukung strategi Mendukung strategi Defensif), Pilihan Strategi keempat (W-T) strategi yang dilakukan: (1) Ketika kita berbicara tentang "defensif" dalam konteks strategi atau taktik, ini biasanya mengacu pada pendekatan atau langkah-langkah yang diambil oleh suatu organisasi atau individu untuk melindungi atau mempertahankan diri mereka dari risiko, ancaman, atau perubahan yang mungkin terjadi. (2) Tingkatkan akurasi data agar mempermudah satuan control pengawas program sehingga RTM dapat terlayani. (3)

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Memberikan pendidikan dengan pendektan keluarga sehingga memiliki kesedaran atas pentingnya menjaga dan memelihara sanitasi yang ditunjang oleh disiplin pengawas program. (4) Pentingnya peningkatan ekobomi keluarga agar makebutuhan dasar seperti penerangan, sanitasi, dan rumah layak huni.

Kuadran 1 (Mendukung Strategi Agresif) (S-O) strategi yang dilakukan: (1) Menoptimalkan Anggaran pemerintah melalui tersedia APBD/APBD Desa/APBN dan tenaga pendamping program dalam rangka mengawal pelaksanaan SPM PUPR. (2) Kerjasama antar stakeholder termasuk Kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan proyek SPM.

Profil Pendidikan. Menurut Fatimah et al. (2023) putus sekolah lebih disebabkan oleh faktor ekonomi antara lain biaya sekolah yang mahal dan kebutuhan keuangan keluarga yang tidak terpenuhi, sedangkan faktor sosial meliputi: lingkungan keluarga yang tidak mendukung dan tekanan sosial di sekolah lingkungan. Faktor pribadi antara lain kurangnya motivasi dan minat dalam pembelajaran serta masalah kesehatan dan kejiwaan. Karena itu, upaya terpadu dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat dan sekolah perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut putus sekolah dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut (Nadine et al. 2023; Putri, et al. 2022). Selain itu, penelitian Alifa (2023) mengemukakan bahwa terjadi peningkatan angka putus sekolah di Indonesia pada tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling keterikatan. Secara umum faktor ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya merupakan faktor yang paling umum yang saling terikat untuk mempengaruhi terjadinya peningkatan angka putus sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam diagram sebagai berikut. Menurut penelitian Arifin (2023) investasi modal manusia tidak hanya diyakini sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, melainkan juga sebagai upaya untuk meningkatkan kemakmuran suatu bangsa. Pemerintah perlu menaruh perhatian serius pada persoalan ini. Setidaknya terdapat empat langkah kebijakan alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu (1) membuat perencanaan investasi jangka panjang dengan menyiapkan human capital investment road map, (2) menjadikan sektor human capital investement sebagai salah prioritas utama investasi (3) melakukan optimalisasi keterserapan anggaran pendidikan untuk perluasan akses dan perbaikan sistem pendidikan, dan (4) meningkatkan akses teknologi dan memastikan ketersediaan layanan pendukung untuk pengembangan teknologi. Lebih lanjut, Sony Eko Adisaputro (2020) menjelaskan bahwa Negara yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan dapat mengambil manfaat besar dari proses ini. Keunggulan dalam penguasaan iptek ini dapat dicapai terutama dengan peningkatan kualitas SDM yang peka serta mampu memanfaatkan berbagai peluang. Adanya pengembangan kualitas manusia juga dapat memperkuat pemahaman dan keimanan agama Islam, bisa juga dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Penguasaan iptek oleh umat Islam (salah satu aspek yang sangat menentukan kebesaran dan kemajuan suatu bangsa atau umat), dimaksudkan agar umat Islam bisa berperan di tengah tengah kemajuan peradaban itu. Martabat suatu bangsa itu bergantung pada akhlaiknya. Jika akhlaiknya rusak, maka rusak binasa pulalah bangsa itu, hal ini menunjukkan bahwa akhlak hendaknya selalu menjadi landasan bagi kehidupan manusia. Sebab kalau tidak demikian, maka kehancuran itu menimpa, baik

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan dengan memprioritaskan sektor Human Capital Investment, pemerintah dan sektor swasta dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas merupakan investasi jangka panjang yang dapat membentuk masa depan yang lebih baik. Implementasi Capaian SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan dan PUPR. Menurut Qori'atunnadyah (2022), salah satu indikator pemerataan pendidikan adalah rasio antara guru dan murid. Semakin kecil nilai rasio guru-murid berarti semakin efektif proses belajar mengajar yang dilakukan sehingga diharapkan mutu pendidikan semakin baik. Selain itu, indeks distribusi guru, dan rasio pengawas sekolah untuk SD. Menurut Cristián dan Gonzalo (2021) dan Hur et al. (2023) model regulasi, kebijakan pendidikan, dan perubahan dalam sistem pendidikan: analisis jangka panjang kasus Chili, dijelaskan bahwa dimensi penting dari analisis komparatif internasional di bidang pendidikan adalah mempelajari model-model regulasi yang menyusun cara penyelenggaraan pendidikan. Capaian SPM pendidikan SMP di Kabupaten Tojo Una-Una. Cukup tinggi, namun masih ada yang masih rendah yakni SPM kecukupan formasi guru PNS, dan proporsi guru penggerak. Damayanti (2023) dan Umboh et al. (2023) Kemendikbud telah meluncurkan program Guru Penggerak. Program tersebut adalah program pendidikan kepemimpinan yang ditujukan guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program Guru Penggerak ini sebagai program pelatihan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin dalam pembelajaran yang berguna untuk siswa (Nudiati & Anggraeni 2023; Dewi et al., 2023).

Sasaran Capaian dan Persentase SPM Kesehatan Triwulan III (2023) sebesar 62,30 %. Capaian tertinggi pada indikator tertinggi Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 107,10 % melebihi dari target, dan Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sebesar 92.79 %. Namun SPM lainnya masih minim, termasuk Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis. Hal ini mengindikasikan bahwa ketidak tercapaian SPM, akan berdampak pada ketahanan SDM yang merupakan tujuan SDGs bidang kesehatan 2030. Sarastri et al. (2023) menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya sebagai strategi yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam menyasar pelaksanaan SPM. Upaya tersebut antara lain menetapkan Kebijakan Walikota tentang Pemenuhan SPM, menetapkan Perjanjian Kinerja Walikota dan Kepala Dinas, melakukan Konsultasi Perumusan Sasaran SPM dengan Kementerian Teknis, melakukan validasi database, menetapkan rencana pemenuhan SPM dalam RPJMD, merumuskan Rencana Aksi, Lintas- Koordinasi Sektoral, sosialisasi dan edukasi kepada pihak-pihak terkait, penguatan pengawasan, pembuatan aplikasi evaluasi rutin secara real time, penegakan sanksi dan pembuatan saluran pengaduan. Disisi lain, penelitian Wirata & Minimal (2023) menunjukan bahwa pelaksanaan SPM Kesehatan di Kabupaten Bangli yang belum mencapai target, karena rendahnya kunjungan masyarakat usia produktif untuk melakukan pemeriksaan, selain itu jumlah SDM kurang memadai dan SDM yang telah mendapatkan pelatihan juga terbatas. Upaya dan solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memaksimalkan pelaksanaan Posbindu PTM dengan cara mengoptimalkan SDM yang terlibat baik dari segi kualitas dan kuantitas dengan cara mengikuti pelatihan serta memaksimalkan

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat usia produktif sehingga meningkatkan kesadaran untuk melakukan pemeriksaan.

Selain itu, Kuzairi et al. (2018) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa implementasi kebijakan SPM dr. RSUD H. Koesnadi Bondowoso masih belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti komunikasi, struktur birokrasi, sumber, disposisi (sikap) dan kepemimpinan dalam pengendalian ego sektoral. Ego sektoral dapat terbentuk dari latar belakang pendidikan dokter spesialis yang masih menganut senioritas dan kurangnya peran individu sebagai pelaksana dalam membangun komunikasi interpersonal dan manajemen konflik. Demikian halnya, An et al. (2023) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kapasitas tanggap darurat di wilayah pedesaan umumnya lebih lemah jika dibandingkan dengan kota-kota besar dan hal ini dapat memberikan dampak buruk terhadap penghidupan dan kesehatan penduduk. Evaluasi manajemen darurat pedesaan sangat penting untuk meningkatkan kapasitas manajemen darurat pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Setiap dimensi penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat memberikan kontribusi lebih dari 20% terhadap kemampuan. Dibandingkan dengan ketiga dimensi lainnya, kontribusi konsep kedaruratan memberikan kontribusi paling rendah, yaitu sebesar 21,69%, dan menunjukkan bahwa dimensi ini merupakan faktor kunci yang menghambat peningkatan kemampuan penanganan kedaruratan. Pengembangan sistem kapasitas manajemen darurat pedesaan yang efektif tidak memadai dan tidak seimbang, sehingga menimbulkan “efek barel”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa SPM kesehatan dapat tercapai jika dikelola dengan manajemen yang baik, dan diperlukan sanksi yang berat jika SPM tidak tercapai. Manajemen risiko terhadap capaian SPM kesehatan bukan hanya merupakan kewajiban untuk memenuhi standar, tetapi juga suatu strategi yang cerdas untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Sistem Penjaminan Mutu (SPM) kesehatan merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan untuk memastikan kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh suatu organisasi atau lembaga. Manajemen risiko terhadap capaian SPM kesehatan menjadi sangat penting untuk memitigasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi kualitas layanan.

Program pada Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, yang terdapat pada bidang Pekerjaan Umum yakni: Target SPM yaitu (1) Akses Terhadap Air Minum Layak, (2) Akses Terhadap Sanitasi Layak, dan (3) Penyediaan Rumah Yang Layak. Capaian SPM PUPR pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar 75,87 %. Capaian SPM tertinggi bidang pelayanan fasilitas buang air besar (jamban) 72,40 %. Namun masih terdapat RTM yang menggunakan fasilitas bersama, dan yang lainnya (khusus wilayah kepulauan memanfaatkan pesisir laut). Investasi dalam penyediaan fasilitas buang air besar yang aman, bersih, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini juga merupakan bagian integral dari pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait air bersih dan sanitasi. Menurut Asih et al. (2023), Kusumawiranti (2022) dan Purba & Hazzah (2022) menjelaskan bahwa Air tidak hanya penting untuk kelangsungan hidup manusia tetapi juga merupakan fondasi untuk ekonomi berbasis biomassa yang berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi Program Penyediaan Air Minum

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) dipastikan terimplementasi dengan baik. Namun, untuk wilayahnya perbukitan berbatu, sebelum adanya program Pansimas, warga masih kesulitan air dan harus mengambil air yang jaraknya cukup lumayan jauh dari rumah. Bahkan harus rela bersusah payah untuk mengambil dan memikul air untuk dibawa kembali ke rumah.

Penggunaan air bersih RTM di Kabupaten Tojo Una-Una dominan leding/PAM, namun penting memastikan bahwa air yang digunakan untuk konsumsi manusia memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi rendah, perlu mendapatkan akses yang mudah dan terjangkau terhadap sumber air minum yang aman dan sehat untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Pada Umumnya RTM masih menggunakan jerami/Ijuk/Rumbia atau daun-daunan sebagai atap rumah. Prinsip bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin atau rentan secara ekonomi adalah ide yang diakui secara luas dalam banyak negara. Pemenuhan hak atas perumahan yang layak merupakan salah satu aspek penting dari hak asasi manusia. Wati et al. (2023) dan Ngabito et al. (2020) menunjukkan bahwa Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Telukjambe sudah efektif dalam pelaksanaannya, baik dari sasaran program yang sudah tepat, sosialisasi program yang terlaksana, tujuan program yang tercapai dan pemantauan program yang dilakukan. Namun, masih adanya misscommunication dalam hal pemantauan dimana pihak ketiga tidak berkoordinasi dengan pemerintah desa.

Perumusan Strategi Prioritas melalui Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) SPM Kesehatan, Pendidikan, dan PUPR. Hasil perumusan strategi prioritas menggunakan QSPM untuk bidang kesehatan, terdapat 7 (tujuh) strategi dengan nilai TAS (Total Alternatif Strategi) yakni tertinggi yakni meningkatkan Rasio Tenaga, dokter, Medis/Non Medis (8,27), terutama ketersediaan Tenaga dokter Spesialisasi Penyakit Dalam di setiap Puskesmas, minimal 1 (satu) dokter, disusul oleh indikator optimalisasi efisiensi dan efektifitas anggaran kesehatan secara prorsional dan rasional, serta memastikan ketersediaan obat-obatan yang cukup dan sesuai dengan kategori penyakitnya. Menurut Sarastri et al. (2023) menjelaskan bahwa terdapat beberapa upaya sebagai strategi yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam menyukseskan pelaksanaan SPM. Upaya tersebut antara lain menetapkan Kebijakan Walikota tentang Pemenuhan SPM, menetapkan Perjanjian Kinerja Walikota dan Kepala Dinas, melakukan Konsultasi Perumusan Sasaran SPM dengan Kementerian Teknis, melakukan validasi database, menetapkan rencana pemenuhan SPM dalam RPJMD, merumuskan Rencana Aksi, Lintas- Koordinasi Sektoral, sosialisasi dan edukasi kepada pihak-pihak terkait, penguatan pengawasan, pembuatan aplikasi evaluasi rutin secara real time, penegakan sanksi dan pembuatan saluran pengaduan. Hal senada disampaikan Ghazali dan Nadjib (2023) dalam temuan penelitiannya menjelaskan bahwa bahwa pengelolaan keuangan publik di Puskesmas, masih terdapat beberapa kelemahan terkait perumusan anggaran, pelaksanaan anggaran dan evaluasi anggaran. Temuan lainnya oleh Sarastri et al. (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan SPM Kesehatan di Kabupaten Bangli yang belum mencapai target rendahnya kunjungan masyarakat usia produktif untuk melakukan pemeriksaan, selain itu jumlah SDM kurang

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

memadai dan SDM yang telah mendapatkan pelatihan juga terbatas. Upaya dan solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memaksimalkan pelaksanaan Posbindu PTM dengan cara mengoptimalkan SDM yang terlibat baik dari segi kualitas dan kuantitas dengan cara mengikuti pelatihan serta memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat usia produktif sehingga meningkatkan kesadaran untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan temuan dalam penelitian tersebut, dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja capaian SPM, tidak terlepas dari faktor pengelolaan anggaran kesehatan, SDM yang berkualitas, dan rasio kecukupan SDM, akurasi data dan perbaikan sarana dan prasarana. Selanjutnya, Perumusan Strategi Prioritas melalui Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) SPM pendidikan khususnya pendidikan PAUD, SD, dan SMP nilai Total Alternatif Strategi, tertinggi yakni strategi pengurangan usia sekolah yang tidak bersekolah, kemudian rasio ketersediaan guru, peningkatan anggaran pemerintah khusus PAUD. Menurut Evelien et al. (2023) menjelaskan agenda global mengenai pendidikan memiliki kepentingan yang signifikan bagi banyak negara. Sustainable Development Goals (SDGs) mempunyai 17 tujuan salah satu tujuannya yaitu tujuan ke-4 yaitu pendidikan berkualitas. Pendidikan sebagai hal yang utama dan patut untuk diperhatikan dalam strategi pembangunan suatu daerah dan sudah semestinya menjadi salah satu hal mendasar yang perlu ditingkatkan dan dibangun. Tingkat pendidikan yang minim menjadikan sebuah bangsa memiliki tingkat kebodohan yang besar, oleh karena itu Indonesia harus meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sistem pendidikan, terlebih lagi di wilayah perbatasan. Lebih lanjut, Evelien et al. (2023) menjelaskan bahwa strategi pembangunan sektor pendidikan di Distrik Muara Tami sampai saat ini belum sepenuhnya dicapai dengan baik, tetapi ada sebagian target yang sudah mengalami kemajuan dalam hal ini berupa renovasi gedung, menyediakan tenaga pendidik yang kompeten, dan sarana-prasarana yang cukup. Menurut Tantowi (2019). Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara sedangkan Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal (Mongan, 2019).

Berbeda dengan temuan yang dilakukan oleh Aurellin en Sentosa (2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni pada tingkat sekolah menengah atas di Indonesia (2) pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni pada tingkat sekolah menengah atas di Indonesia (2) pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni pada tingkat sekolah menengah atas di Indonesia. Tingkat sekolah di Indonesia (3) Kemiskinan sebagai ukuran persentase penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni sekolah menengah di Indonesia (Sanniana et al., 2020; Sasongko et al., 2021; Susanti & Hidayat ; 2020).

Perumusan Strategi Prioritas melalui Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) SPM PUPR, Berdasarkan nilai TAS, maka pilihan strategi jangka pendek yakni strategi mengoptimalkan penggunaan tata kelola anggaran dalam kegiatan peningkatan capaian SPM PUPR dengan tepat sasaran. Selanjutnya, Peningkatan Ekonomi Keluarga RTM dan

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Peningkatan Akses, Untuk jangka menengah atau panjang Peningkatan Kesadaran Masyarakat, Pendidikan Keluarga RTM. Paputungan et al. (2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan korelasi yang sangat kuat antara anggaran rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan anggaran penyediaan Rumah Layak Huni terkena dampak relokasi program pemerintah dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang perumahan di Kota Kotamobagu, terdapat pengaruh signifikan positif baik anggaran rehabilitasi Rumah Layak Huni untuk korban bencana dan anggaran penyediaan Rumah Layak Huni untuk terkena dampak relokasi program pemerintah secara parsial maupun bersama-sama terhadap Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Kota Kotamobagu.

Selanjutnya, Laras et al. (2023) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan, dioperasikan setelah memenuhi laik fungsi dan administrasi, pihak yang bertanggung jawab Dinas PUPR dan instansi terkait, segala pembiayaan dari Pemda Kab Kendal, faktor penghambat diantaranya, (1) kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat, (2) belum adanya sumber daya atau pegawai yang memiliki kapasitas pengawasan jalan, (3) Kewenangan pembangunan jalan ada di Dinas PUPR, sehingga jika terjadikerusakan jalan menunggu perbaikan dari dinas tersebut, (4) prosesur yang ditempuh dalam perbaikan jalan membutuhkan waktu lama.

Menurut Andrianus & Alfatih (2023), hasil analisis dengan pendekatan random effect model menunjukkan bahwa sanitasi, ketenagalistrikan, dan infrastruktur jalan mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya peningkatan setiap infrastruktur berpengaruh terhadap penurunan persentase penduduk miskin di Indonesia. Dengan demikian, terlihat bahwa peningkatan setiap variabel sanitasi, listrik, dan jalan berpengaruh signifikan terhadap penurunan persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Menurut Yaya et al. (2018), dalam analisis regresi, kurangnya akses terhadap toilet yang lebih baik dan fasilitas air bersih masing-masing mempunyai peluang 14% dan 16% lebih tinggi untuk terkena penyakit ini diare dibandingkan dengan mereka yang mempunyai akses lebih baik. Kesimpulan: Terdapat hubungan antara kualitas lingkungan hidup, termasuk airdan fasilitas sanitasi, dan diare pada anak balita di Nigeria. Senada dengan hasil kajian Brown et al. (2023) menggaris bawahi perlunya investasi berkelanjutan untuk mewujudkan hak asasi manusia atas air dan sanitasi.

Selanjutnya, Liu et al. (2023) menemukan bahwa dampak pengentasan kemiskinan melalui relokasi: Dari perspektif pendapatan dan kemiskinan multidimensi, hasilnya menunjukkan bahwa angka kejadian kemiskinan multidimensi pada rumah tangga miskin melebihi angka kemiskinan pendapatan, dan penurunannya lebih cepat dibandingkan angka kemiskinan pendapatan. Namun, tumpang tindih antara kemiskinan multidimensi dan kemiskinan pendapatan tergolong rendah, yaitu masing-masing sebesar 26,3%, 4,9%, dan 0% pada tahun 2016, 2018, dan 2020. Poverty Alleviation through Relocation (PAR) menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap pendapatan rumah tangga miskin dan kemiskinan multidimensi, dan semakin lama waktu relokasi maka pengaruhnya semakin signifikan. PAR mengurangi kemiskinan pendapatan rumah tangga miskin terutama dengan meningkatkan

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

pendapatan upah dan pendapatan properti, dan kemiskinan multidimensi terutama dengan meningkatkan standar hidup mereka. Dampak PAR terhadap pendapatan dan kemiskinan multidimensi bersifat heterogen secara regional. Langkah-langkah pasca relokasi harus meningkatkan pendapatan dan kemampuan rumah tangga miskin melalui pengembangan industri, bantuan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan layanan publik. Selain itu, standar pendapatan dan kemiskinan multidimensi harus diadopsi bersama dalam tata kelola kemiskinan relatif.

Berdasarkan uraian tersebut, maka disimpulkan bahwa SPM PUPR, sangat bergantung pada alokasi anggaran, infrastruktur yang layak, dan keakuratan data RTM, yang masuk dalam program layak infrastruktur dasar, penyediaan air bersih dan sanitasi yang aman sebagai kewajiban pemerintah, tanpa memandang faktor-faktor seperti ras, dan etnis.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan, maka disimpulkan sebagai berikut: (1) Rumah Tangga Miskin Ekstrem di Kabupaten Tojo Una-Una, berdasarkan individu (jiwa), maka tertinggi berada pada desil I sebanyak 28,2 %, disusul oleh desil III 26,3 %, desil II 23,04 %, dan Desil IV sebanyak 22,5 %. Sebaran Pendidikan Terakhir berdasarkan Data P3KE Kabupaten Tojo Una-Una, dominan tamat SD sebanyak 45 %. Dan pekerjaan kepala keluarga dominan petani dan nelayan. (2) Implementasi capaian kinerja SPM pada bidang pendidikan sebesar 63,60 %, bidang kesehatan 62,30 %, dan capaian SPM PUPR sebesar 75,87 %. (3) Strategi Pencapaian Target SPM Dalam Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem. Untuk Bidang kesehatan berada pada kuadran I (S-O) dan kuadran II (S-T). Untuk bidang pendidikan berada pada kuadran kuadran I (S-O) dan kuadran II (S-T). Sedangkan untuk bidang PUPR berada pada kuadran II (S-T) dan kuadran IV (W-T). (4) QSPM untuk bidang pendidikan (TAS), tertinggi yakni strategi pengurangan usia sekolah yang tidak bersekolah, kemudian rasio ketersediaan guru, dan peningkatan anggaran pemerintah khusus PAUD; nilai TAS bidang kesehatan, terdapat 7 (tujuh) strategi dengan nilai TAS (Total Alternatif Strategi) tertinggi yakni meningkatkan Rasio Tenaga, dokter, Medis/Non Medis, terutama ketersediaan Tenaga dokter Spesialisasi Penyakit Dalam di setiap Puskesmas, minimal 1 (satu) dokter, dan nilai TAS bidang PUPR, pilihan strategi jangka pendek yakni strategi mengoptimalkan penggunaan tata kelola anggaran dalam kegiatan peningkatan capaian SPM PUPR dengan tepat sasaran.

Referensi

- Alifa, V. N. (2023). Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Putus Sekolah di Indonesia pada Tahun 2022. *Jurnal Pendidikan Sultan Agung* 3(2): 175. <https://doi.org/10.30659/jp-sa.3.2.175-182>.
- An, M. Mingfang L., Hui, A., & Ramsey, S. T. (2023). Systematic evaluation of emergency management capacity for rural public health emergencies. *International Journal of Disaster Risk Reduction* 85.
- Andrianus, F., dan K. Alfatih. 2023. "Pengaruh Infrastruktur terhadap Kemiskinan dengan Menggunakan Data Panel 34 Provinsi di Indonesia". *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*.

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Arifin, Ahmad Syamsul. 2023. "Human Capital Investment: Meningkatkan Daya Saing Global Melalui Investasi Pendidikan". *Jurnal Education and Development* 11(2):174–79. doi: 10.37081/ed.v11i2.4672.

Arvin, Mahmoud, Shahram Bazrafkan, Parisa Beiki, en Ayyoob Sharifi. 2023. "A county-level analysis of association between social vulnerability and COVID-19 cases in Khuzestan Province, Iran". *International Journal of Disaster Risk Reduction* 84(July 2022):103495. doi: 10.1016/j.ijdr.2022.103495.

Asih, M. A., Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, en Kabupaten Tabalong. 2023. "Http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB ISSN : 2723-0937". 6:549–61.

Aurellin, Devliana, en Sri Ulfa Sentosa. 2023. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap APM (Angka Partisipasi Murni) di Indonesia". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 5(2):89.

Brown, Joe, Charisma S. Acey, Carmen Anthonj, Dani J. Barrington, Cara D. Beal, Drew Capone, Oliver Cumming, Kristi Pullen Fedinick, Jacqueline MacDonald Gibson, Brittany Hicks, Michal Kozubik, Nikoleta Lakatosova, Karl G. Linden, Nancy G. Love, Kaitlin J. Mattos, Heather M. Murphy, en Inga T. Winkler. 2023. "The effects of racism, social exclusion, and discrimination on achieving universal safe water and sanitation in high-income countries". *The Lancet Global Health* 11(4):e606–14. doi: 10.1016/S2214-109X(23)00006-2.

Damayanti, Devi, Masduki Asbari, en Arbiatul Zaharantika. 2024. "Guru Penggerak : Pengembangan Pendidikan melalui Kepemimpinan Guru". 03(02):5–10.

Dewi, Anita Wahyuni, Agus Hasbi Noor, en Prita Kartika. 2023. "Minat Belajar Daring Anak Kesetaraan Paket a". 6:92–97.

Evelien Kwano Yoku, Sarah, Putri Hergianasari, en Sri Suwartiningsih. 2023. "Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Pada Wilayah Perbatasan Ri-Png Di Distrik Muara Tami Kota Jayapura Tahun 2019-2020". *Administraus* 7(2):54–70.

F. Sofyandi. 2017. "Kemiskinan, Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 18(2):157–71.

Fatimah, Nurul, Bambang Genjik, Pendidikan Ekonomi, en Universitas Tanjungpura. 2023. "Volume 12 Nomor 9 Tahun 2023 Halaman 2451-2458 ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK PUTUS SEKOLAH". 12(20):2451–58. doi: 10.26418/jppk.v12i9.69601.

Ghozali, Akhmad, en Mardiaty Nadjib. 2023. "Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Capaian Spm Hiv: Studi Kasus Di Puskesmas Kota X Tahun 2022". *Jurnal Kesehatan Tambusai* 4(2):1546–58.

Halida, Annisa, Nadya Farah Pradita, Yuana Sukmawaty, en Nadya Farah Pradita. 2020. "Dengan Pendekatan Principal Component Analysis". *Jurnal Al Qardh* 5(2):134–41.

Hur, Eun Hye, Katherine Ardeleanu, Tonya W. Satchell, en Lieny Jeon. 2023. "Why are they leaving? Understanding Associations between early childhood program policies and teacher

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

turnover rates”. *Child and Youth Care Forum* 52(2):417–40.

Kusumawiranti, Retno. 2022. “Pengelolaan Air Bersih (Pab) Banyumili Berbasis Masyarakat Di Srimulyo Piyungan Bantul”. *Populika* 10(2):62–72.

Kuzairi, Untung, Hary Yuswadi, Agus Budihardjo, en Himawan Bayu Patriadi. 2018. “The Implementation of Minimum Service Standards (MMS) on Public Service for Health Services Sector in Bondowoso, Indonesia”. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8(1):56.

Laras Endah Cahyani, Muhammad Fatchuriza, en Maulida Putri Rahmawati. 2023. “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Langenharjo di Kabupaten Kendal (Studi Kasus Kerusakan Jalan di Kelurahan Langenharjo)”. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9(2):346–61.

Linggi, Rita Kala, Anwar Alaydrus, Hendra Saputra, Kabupaten Aceh Jaya, Cut Asmaul Husna, Yeni Sri Lestari, Faksionalisasi Partai, Politik Golkar, Di Kalimantan, Smart City, Di Kabupaten, Maulida Putri Rahmawati, Muhammad Fatchuriza, Aswar Annas, Humaidid Muhajir, Syafruddin Syafruddin, Siti Hasanah, Resolusi Konflik, Alih Fungsi, Pangkalan Truk, Banyuputih Menjadi, Kabupaten Batang, Muhammad Fatchuriza, en Maulida Putri Rahmawati. 2022. “Daftar Isi (Table of Content) *Journal of Government and Politics Jgop.fisip@ummat.ac.id*”. Vol 04, No:155–74.

Liu, Mingyue, Xiaolong Feng, Yifu Zhao, en Huanguang Qiu. 2023. “Impact of poverty alleviation through relocation: From the perspectives of income and multidimensional poverty”. *Journal of Rural Studies* 99:35–44.

Mongan, Jehuda Jean Sanny. 2019. “Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia”. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 4(2):163–76.

Nadine, Adha, Inggrita Gusti, en Sari Nasution. 2023. “TALENTA Conference Series Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Anak Usia Sekolah Memutuskan untuk Menjadi Tenaga Kerja Rumah Tangga di Kabupaten Labuhanbatu Analysis of the Factors That Cause School-Age Children to Decide to Become Household Workers in”. 06. doi: 10.32734/lwsa.v6i1.1687.

Ngabito, Neneng, Darmawaty Abd Razak, en Balada Raf. 2023. “Implementasi Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo”. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2(1):76–93.

Nudiati, Deti, en Lena Miranti Anggraeni. 2023. “Upaya Pengelola Melalui Program Pohon Geulis Dalam Meningkatkan Minat Baca Peserta Didik Program Kesetaraan Paket C”. 6:715–29.

Paputungan, Chelsia, Agnes L. Ch. P. Lopian, en George M. V Kawung. 2023. “Analisis Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Kota Kotamobagu”. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 24(2):163–77.

Purba & Hazzah. 2022. “Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Jandiraya Kecamatan Dolog Masagal Kabupaten Simalungun”. *Profesional Komunikasi & Administrasi Publik* 9(2):475–84.

Putri, Desi Rahma, Wilson Wilson, en Ria Rizkia Alvi. 2022. “Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Menjadi Pekerja Anak di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan”. *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5(2):230–39. doi: 10.47467/as.v5i2.2195.

Qori’atunnadyah, Marita. 2022. “Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Rasio Guru-Murid Pada Jenjang Pendidikan Menggunakan Algoritma K-Means”. *Journal of Informatics Development* 1:33–38.

Rahayu, F. I., M. Noor, en M. J. Amini. 2023. “Inovasi Mal Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Samarinda”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Sanniana Sidabutar, Elidawaty Purba, en Pawer Darasa Panjaitan. 2020. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten Simalungun”. *Jurnal Ekuilnomi* 2(2):86–101.

Sarasri, Linggar, Indarto Indarto, en Paulus Wardoyo. 2023. “Strategi Meningkatkan Capaian Standar Pelayanan Minimal Pada Pemerintah Kota Magelang”. *Solusi* 21(4):792.

Sasongko, Hendro, Agung Fajar Ilmiyono, en Zhafira Huriya Aldillah. 2021. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019”. *Jurnal Akunida* 7(1):12–29.

Sony Eko Adisaputro. 2020. “Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Milenial Membentuk Manusia Bermartabat”. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam* 1(1):1–27. doi: 10.53429/j-kis.v1i1.118.

Susanti, Endah, en Nur Hidayat. 2020. “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur”. *Eco-Build Journal* 4(2):25–34.

Syafingi, Habib Muchsin. 2017. “Konstitusionalitas Standar Pelayanan Minimal”. *Jurnal Hukum Novelty* 8(2):216. doi: 10.26555/novelty.v8i2.a7020.

Syahrani, Erliza. 2021. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi* 5(2):247–58. doi: 10.29408/geodika.v5i2.4033.

Tantowi, Rahmat. 2019. “Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Strategi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik”. *Jurnal Samudra Ekonomika* 3(2):175–85.

Thi Phuong, Tran, Nguyen Quang Tan, Nguyen Cong Dinh, Nguyen Hoang Khanh Linh, en Pham Huu Ty. 2023. “Flood Vulnerability-Rural Poverty Nexus: Implications for Disaster Risk Reduction and Sustainable Rural Development in Vietnam”. *Environment and Ecology Research* 11(2):362–77. doi: 10.13189/eer.2023.110210.

Umar, Bridget Bwalya, Moses N. Chisola, Garikai Membele, David Kafwamba, Chibuye F.

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Kunda-Wamuwi, en Beverly M. Mushili. 2023. "In the Intersection of Climate Risk and Social Vulnerabilities: a Case of Poor Urbanites in Lusaka, Zambia". *Urban Forum* 34(1):133–53.

Umboh, P. Christian, J. Florence Lengkong, en N. Novva Plangiten. 2023. "Efektivitas Program Guru Penggerak Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Di Smp Negeri 3 Tumpaan". *Jurnal Administrasi Publik* IX(2):117–31.

Wati, Pika Aulia, Hanny Purnamasari, en Dewi Noor Azijah. 2023. "Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang". *Community Development Journal* 4(3):6099–6104.

Wirata, Gede, en Standar Pelayanan Minimal. 2023. "Minimal Kesehatan Di Kabupaten Bangli Tahun 2022". 6:633–38.

Yaya, Sanni, Alzahra Hudani, Ogochukwu Udenigwe, Vaibhav Shah, Michael Ekholuenetale, en Ghose Bishwajit. 2018. "Improving water, sanitation and hygiene practices, and housing quality to prevent diarrhea among under-five children in Nigeria". *Tropical Medicine and Infectious Disease* 3(2):1–11. doi: 10.3390/tropicalmed3020041.

Yuniarti, Tri, Pengaruh Pengetahuan, Kesehatan Lingkungan, Isnani Nurhayati, Anggie Pradana Putri, Nur Fadhillah, Stikes Mambaul, Ulum Surakarta, Fakultas Kesehatan, en Universitas Muhammadiyah Pringsewu. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Kesehatan Lingkungan Terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan". *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 9(2):78–82. doi: 10.52657/JIK.V9I2.1233.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)